

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam melaksanakan Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah dan selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 273 ayat 3 menyebutkan bahwa rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 disusun melalui 4 (empat) tahapan yaitu pertama persiapan penyusunan Renja; kedua penyusunan rancangan Renja; ketiga pelaksanaan forum PD; dan keempat penetapan Renja. Tahap persiapan dimulai dengan menyusun rancangan keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang pembentukan tim penyusun Renja Sekretariat Daerah, orientasi mengenai Renja Sekretariat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Sekretariat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Tahap kedua yaitu penyusunan rancangan Renja disusun mengacu pada rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019, mengacu pada RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 serta Rancangan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022, dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 serta Tahun 2018 untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Sekretariat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Renja Sekretariat Daerah juga disusun dengan harapan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang merupakan acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dan mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Tahapan ketiga yaitu membahas rancangan Renja Sekretariat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembahasan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan menyelaraskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan usulan program dan kegiatan biro-biro; menajamkan indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah; menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing biro; menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang penyampaian rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019. Peserta Forum Perangkat Daerah Provinsi terdiri dari Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat daerah kabupaten/kota dan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat dari

program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung.

Hasil kesepakatan pembahasan forum PD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang menghadiri forum PD untuk selanjutnya hasil kesepakatan ini dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja PD yang merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyempurnaan rancangan Renja dilakukan setelah RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan. Setelah disempurnakan kemudian diverifikasi untuk memastikan rancangan Renja telah sesuai dengan RKPD, untuk selanjutnya Renja Sekretariat Daerah tahun 2019 ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D). Sebagai lembaga perencanaan, Sekretariat Daerah diharapkan mampu membantu menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selain itu perencanaan adalah suatu proses kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhitungkan sumberdaya, IPTEK dan memperhatikan perkembangan global.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 akan dijadikan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerahnya, dimana mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah untuk menciptakannya sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan berupa program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Tujuan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2019;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

Fungsi Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Sekretariat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Sekretariat Daerah TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2017), mengacu pada APBD tahun anggaran

2017. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat Daerah; menguraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Sekretariat Daerah Provinsi dengan Sekretariat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bapepda.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.